

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK
PEMERINTAH DAERAH DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

Afriyanto¹⁾, Kamaliah²⁾, Zulfahridar²⁾

¹⁾ Staff Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

²⁾ Staff Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

Abstract

This research aimed to analyze the differences in the financial performance of rural banks owned of local government with rural bank owned of private in terms of CAR, NPL, PPAP, ROA, ROA, CR, and LDR factors. Data analysis techniques in quantitative research uses statistical analysis consisted of a descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. Descriptive statistical analysis was used to describe the characteristics of the variables researched, while the inferential statistical analysis was used to see the difference in financial performance of rural banks owned of local government and owned of private by using a statistical test by the use of test model Mann-Whitney. Based on the results of the research showed that the average ratio of CAR, PPAP, ROA, ROA, and CR between rural banks owned of local government with rural bank owned of private no difference and financial performance both are in a healthy condition, while the average ratio of NPL in an equally unhealthy conditions. For average ratio LDR of rural bank owned of local government are in unhealthy conditions while the average ratio of LDR of rural bank owned of private in unsanitary conditions. Overall, there was no difference in financial performance between rural banks owned of local government with rural bank owned of private.

Keywords: CAR, NPL, PPAP, ROA, ROA, CR, LDR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta ditinjau dari faktor KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri variabel-variabel yang diteliti sedangkan analisis statistik inferensial digunakan untuk melihat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan milik swasta dengan menggunakan alat uji statistik berupa uji beda dengan menggunakan model uji mann whitney. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio rata-rata KPMM, PPAP, ROA, BOPO, dan CR antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang sehat sedangkan rasio rata-rata NPL berada dalam kondisi sama-sama kurang sehat. Untuk rasio rata-rata LDR Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak sehat sedangkan rasio rata-rata LDR Bank Perkreditan Rakyat milik swasta berada dalam kondisi kurang sehat. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan kinerja finansial antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta.

Kata kunci: KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, LDR

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu pelaku usaha dalam dunia

perbankan juga memiliki peranan penting dalam rangka ikut memajukan perekonomian di Indonesia meskipun

skala kegiatan usahanya tidak sebesar bank umum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) wilayah Riau per 31 Desember 2014 diketahui bahwa jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Riau sebanyak 35 BPR yang tersebar dalam 10 kabupaten/kota. Dari segi kepemilikan modal, BPR di Provinsi Riau dibagi menjadi dua bagian yaitu milik pemerintah daerah sebanyak 7 BPR dan milik swasta sebanyak 28 BPR.

Ditinjau dari segi pemilik modal, Bank Perkreditan Rakyat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta. Adanya perbedaan kepemilikan modal ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan pula dalam hal cara pengelolaan usaha yang dilakukan.

Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah maupun milik swasta sama-sama mengelola dana dari masyarakat dan sama-sama memberikan kredit kepada nasabah serta melaksanakan berbagai jenis kegiatan lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk menilai hasil pengelolaan usaha yang dilakukan maka bisa dilihat dari kinerja finansial yang dihasilkan.

Penilaian kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat dengan menggunakan beberapa rasio keuangan tersebut bertujuan untuk mengukur dan menilai kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah dan milik swasta sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi, efektivitas, dan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dalam mengelola keuangannya.

Membandingkan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta perlu

dilakukan karena pada BPR milik pemerintah daerah terdapat berbagai kebijakan dari pemerintah daerah selaku pemegang saham utama untuk ikut campur tangan dalam kegiatan operasional BPR sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan BPR.

Berbeda dengan BPR milik swasta yang mana dalam operasionalnya tidak pernah ada campur tangan pihak lain, artinya kinerja finansial yang dihasilkan memang berasal dari usaha yang dilakukan oleh pengelola BPR tanpa adanya campur tangan pihak lain untuk menjaga kinerja finansialnya.

Dengan adanya perbedaan ini, maka perlu dilakukan penilaian kinerja finansial antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta yang tidak ada campur tangan pihak lain untuk membuat kebijakan menjaga kinerja finansial.

Penilaian kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan milik swasta sangat diperlukan untuk melihat tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Dari penelitian ini, dapat dibandingkan dan dilihat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan milik swasta serta bisa diketahui Bank Perkreditan Rakyat milik siapa yang lebih baik kinerjanya.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk menilai perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan milik swasta yang beroperasi di Provinsi Riau. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Kinerja Finansial Bank Perkreditan Rakyat Milik

Pemerintah Daerah dan Milik Swasta di Provinsi Riau.

Menurut pendapat Fahmi (2011), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Rasio keuangan BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan PBI tersebut sebagaimana dinyatakan dalam bab III pasal 8 ayat (3) huruf b ditetapkan bahwa rasio keuangan yang dijadikan sebagai pedoman penilaian kinerja keuangan terdiri dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), *Non Performing Loans* (NPL), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Return On Asset* (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio* (CR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Menurut Azwar (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, oleh karena itu perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian. Hipotesis ini akan diuji untuk memastikan bahwa hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

- H1 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor KPM.
- H2 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor NPL.
- H3 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor PPAP.
- H4 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor ROA.
- H5 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor BOPO.
- H6 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor CR.
- H7 : Terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor LDR.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini akan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada serta penelitian ini menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan publikasi BPR milik pemerintah daerah

dan milik swasta yang beroperasi di Prov. Riau.

Instrumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi berupa laporan keuangan BPR terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi serta Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan informasi lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Data-data tersebut bersumber dari *website* resmi Bank Indonesia dengan nama situs www.bi.go.id.

Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data terdiri dari: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Dalam melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi yaitu dengan meminta atau mengambil data-data keuangan BPR berupa laporan keuangan tahunan.

Dalam penelitian tesis ini, populasinya adalah seluruh BPR milik pemerintah daerah dan milik swasta yang beroperasi di provinsi Riau sebanyak 35 BPR.

Dari 35 BPR di Provinsi Riau ternyata yang mengunggah sebanyak 27 BPR dengan rincian 5 BPR milik pemerintah daerah dan 22 BPR milik swasta.

Sampel penelitian untuk BPR milik pemerintah daerah sebanyak 5 BPR sedangkan BPR milik swasta diambil 7 sampel penelitian dengan alasan untuk menyederhanakan pembahasan penelitian dengan BPR milik pemerintah daerah, karena kalau digunakan 22 BPR milik swasta kurang berimbang dengan BPR milik pemerintah daerah.

Alasan lainnya yaitu alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik sehingga

sampel penelitian yang dipakai sebanyak 12 BPR tidak menyalahi metodologi penelitian.

KPMM atau istilah lainnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Standar penilaian atau pengukuran yang digunakan yaitu:

Tabel 1 Standar Rasio KPMM

No	Range Rasio KPMM	Kriteria Kondisi
1	> 8%	Sehat
2	7,999% – 8%	Cukup Sehat
3	6,5% – 7,999%	Kurang Sehat
4	< 6,5%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

NPL merupakan angka yang menunjukkan besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu bank dibandingkan dengan total keseluruhan kredit yang diberikan. Standar penilaian atau pengukuran yang digunakan yaitu:

Tabel 2 Standar Rasio NPL

No	Range Rasio NPL	Kriteria Kondisi
1	< 5%	Sehat
2	> 5%	Kurang Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

PPAP adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (utang pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Standar penilaian yang digunakan yaitu:

Tabel 3 Standar Rasio PPAP

No	Range Rasio PPAP	Kriteria Kondisi
1	> 81%	Sehat
2	66% – 81%	Cukup Sehat
3	51% – 66%	Kurang Sehat
4	< 51%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki setelah dikurangi dengan biaya-biaya modal. Standar penilaian atau pengukuran yang digunakan yaitu:

Tabel 4 Standar Rasio ROA

No	Range Rasio ROA	Kriteria Kondisi
1	> 1,215%	Sehat
2	> 0,999% – < 1,215%	Cukup Sehat
3	> 0,765% – < 0,999%	Kurang Sehat
4	< 0,765%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional di mana semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank. Standar penilaian yang digunakan yaitu:

Tabel 5 Standar Rasio BOPO

No	Range Rasio BOPO	Kriteria Kondisi
1	< 93,52%	Sehat
2	> 93,52% – < 94,72%	Cukup Sehat
3	> 94,72% – < 95,92%	Kurang Sehat
4	> 95,92%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

CR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang paling likuid. Standar penilaian yang digunakan yaitu:

Tabel 6 Standar Rasio Liquidity

No	Range Rasio CR	Kriteria Kondisi
1	> 4,05%	Sehat
2	> 3,30% – < 4,05%	Cukup Sehat
3	> 2,55% – < 3,30%	Kurang Sehat
4	< 2,55%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

LDR adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank atau LDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Standar penilaian yang digunakan yaitu:

Tabel 7 Standar Rasio Liquidity

No	Range Rasio LDR	Kriteria Kondisi
1	< 94,75%	Sehat
2	> 94,75% – < 98,50%	Cukup Sehat
3	> 98,50% – < 102,25%	Kurang Sehat
4	> 102,25%	Tidak Sehat

Sumber: PBI Nomor 6/10/PBI/2004

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri variabel-variabel yang akan diteliti atau merangkum hasil pengamatan penelitian yang akan dilakukan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum sesuai dengan data yang diperoleh dari sampel kajian.

Analisis statistik inferensial biasanya dilakukan karena populasi penelitian terlalu besar dan peneliti terbatas untuk meneliti semua subjek dalam populasi. Dalam analisis statistik inferensial ini akan dibuat hipotesis penelitian dan menentukan uji statistik yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah ditentukan.

Untuk melihat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dan milik swasta, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan alat uji statistik berupa uji beda dengan menggunakan model uji *mann whitney*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian tentang perbedaan kinerja finansial BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 8 Rasio KPMM BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio KPMM	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	43,10%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	29,44%	Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu Kampar	24,87%	Sehat
4	PD. BPR. Gemilang Indragiri Hilir	29,65%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah Pelalawan	55,71%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

Sesuai dengan tabel 8 di atas terlihat bahwa kelima BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan berada di atas 8%.

Tabel 9 Rasio NPL BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio NPL	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	1,28%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	11,02%	Kurang Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu	15,47%	Kurang Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	4,52%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah	4,40%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 9 di atas terlihat bahwa tiga BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat karena rasionya kurang dari 5% sedangkan dua BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi kurang sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 5%.

Tabel 10 Rasio PPAP BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio PPAP	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	97,42%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	97,82%	Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu Kampar	90,88%	Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	92,35%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah	89,33%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 10 di atas terlihat bahwa kelima BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan berada di atas 81%.

Tabel 11 Rasio ROA BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio ROA	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	6,98%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	2,40%	Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu	-0,75%	Tidak Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	3,02%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah	5,77%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 11 di atas terlihat bahwa empat BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 1,215% sedangkan satu BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari 0,765%.

Tabel 12 Rasio BOPO BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio BOPO	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	69,40%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	85,33%	Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu	102,81%	Tidak Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	83,30%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah	71,15%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 12 di atas terlihat bahwa empat BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasionya kurang dari 93,52% sedangkan satu BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasionya lebih dari 95,92%.

Tabel 13 Rasio CR BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio CR	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	41,38%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	32,14%	Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu	29,15%	Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	22,49%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah Pelalawan	30,74%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 13 di atas terlihat bahwa kelima BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 4,05%.

Tabel 14 Rasio LDR BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Nama BPR	Rasio LDR	Kategori
1	PD. BPR. Rokan Hulu	83,12%	Sehat
2	PD. BPR. Rokan Hilir	149,51%	Tidak Sehat
3	PD. BPR. Sarimadu	92,67%	Sehat
4	PD. BPR. Gemilang	88,79%	Sehat
5	PD. BPR. Dana Amanah	107,30%	Tidak Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

Sesuai dengan tabel 14 di atas terlihat bahwa tiga BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari 94,75% sedangkan dua BPR milik pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 102,25%.

Tabel 15 Rata-Rata Rasio BPR Milik Pemerintah Daerah

No	Jenis Rasio Keuangan	Rata-Rata	Kategori
1	KPMM	36,55%	Sehat
2	NPL	7,34%	Kurang Sehat
3	PPAP	93,56%	Sehat
4	ROA	4,36%	Sehat
5	BOPO	82,40%	Sehat
6	CR	31,18%	Sehat
7	LDR	104,28%	Tidak Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Tabel 16 Rasio KPMM BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio KPMM	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis	12,45%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari Dumai	49,36%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani Kampar	16,54%	Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	21,66%	Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau Pelalawan	36,33%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru	18,11%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Rokan Hilir	22,41%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 16 di atas terlihat bahwa ketujuh Bank Perkreditan Rakyat milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan berada di atas 8%.

Tabel 17 Rasio NPL BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio NPL	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia	2,60%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari	4,25%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani	11,57%	Kurang Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	12,72%	Kurang Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau	0,24%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu	3,56%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera	35,35%	Kurang Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 17 di atas terlihat bahwa empat BPR milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari 5% sedangkan tiga BPR milik swasta berada dalam kondisi kurang sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 5%.

Tabel 18 Rasio PPAP BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio PPAP	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia	46,11%	Tidak Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari	54,26%	Kurang Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani	63,41%	Kurang Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	214,14%	Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau	88,36%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu	100%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera	22,70%	Tidak Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 18 di atas terlihat bahwa tiga BPR milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan berada di atas 81%, dua BPR milik swasta berada dalam kondisi kurang sehat

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

dikarenakan rasio yang dihasilkan antara 51% – 66%, dan dua BPR milik swasta berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari 51%.

Tabel 19 Rasio ROA BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio ROA	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia	3,69%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari	5,62%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani	0,13%	Tidak Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	2,27%	Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau	9,40%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu	8,37%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera	2,06%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 19 di atas terlihat bahwa enam BPR milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 1,215% sedangkan satu BPR milik swasta berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari 0,765%.

Tabel 20 Rasio BOPO BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio BOPO	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia	71,18%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari	70,92%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani	103,93%	Tidak Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	92,46%	Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau	65,92%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu	65,23%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera	89,98%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 20 di atas terlihat bahwa enam BPR milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari

93,52% sedangkan satu BPR milik swasta berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 95,92%.

Tabel 21 Rasio CR BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio CR	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia	45,89%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari	58,13%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani	30,92%	Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	20,83%	Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau	25,24%	Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu	33,34%	Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera	24,96%	Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 21 di atas terlihat bahwa ketujuh Bank Perkreditan Rakyat milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 4,05%.

Tabel 22 Rasio LDR BPR Milik Swasta

No	Nama BPR	Rasio LDR	Kategori
1	PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis	56,13%	Sehat
2	PT. BPR Dumai Kapital Lestari Dumai	62,62%	Sehat
3	PT. BPR Bumi Riau Insani Kampar	65,14%	Sehat
4	PT. BPR Cempaka Mitra Nagori Kuansing	103,29%	Tidak Sehat
5	PT. BPR Universal Karya Mandiri Riau Pelalawan	167,95%	Tidak Sehat
6	PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru	118,48%	Tidak Sehat
7	PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Rokan Hilir	132,24%	Tidak Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Sesuai dengan tabel 22 di atas terlihat bahwa tiga BPR milik swasta berada dalam kondisi sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan kurang dari

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

94,75% sedangkan empat BPR milik swasta berada dalam kondisi tidak sehat dikarenakan rasio yang dihasilkan lebih dari 102,25%.

Tabel 23 Rata-Rata Rasio BPR Milik Swasta

No	Jenis Rasio Keuangan	Rata-Rata	Kategori
1	KPMM	25,27%	Sehat
2	NPL	10,04%	Kurang Sehat
3	PPAP	84,14%	Sehat
4	ROA	4,51%	Sehat
5	BOPO	79,95%	Sehat
6	CR	34,19%	Sehat
7	LDR	100,84%	Kurang Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Tabel 24 Rata-Rata Rasio BPR Milik Pemerintah Daerah dan Swasta

No	Jenis Rasio	BPR Milik Pemerintah Daerah	Kategori	BPR Milik Swasta	Kategori
1	KPMM	36,55%	Sehat	25,27%	Sehat
2	NPL	7,34%	Kurang Sehat	10,04%	Kurang Sehat
3	PPAP	93,56%	Sehat	84,14%	Sehat
4	ROA	4,36%	Sehat	4,51%	Sehat
5	BOPO	82,40%	Sehat	79,95%	Sehat
6	CR	31,18%	Sehat	34,19%	Sehat
7	LDR	104,28%	Tidak Sehat	100,84%	Kurang Sehat

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel 24 di atas terlihat bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa rata-rata kinerja finansial antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta tidak memiliki perbedaan yang mencolok dikarenakan kinerja finansial keduanya berada dalam kategori yang sama semuanya.

Untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah dibuat sebelumnya maka dilakukan pengujian hipotesis dengan uji beda yaitu dengan menggunakan model uji *mann whitney*.

Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada perbedaan antara kinerja finansial BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta berdasarkan rasio-rasio keuangan yang telah dibahas sebelumnya.

Hipotesis 1:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,088 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor KPMM.

Hipotesis 2:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,808 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor NPL.

Hipotesis 3:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,223 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor PPAP.

Hipotesis 4:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,808 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor ROA.

Hipotesis 5:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,808 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor BOPO.

Hipotesis 6:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,808 > 0,05, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor CR. Hasil ini sesuai juga dengan hasil pengujian analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan. Hipotesis 7:

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,808 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan milik swasta ditinjau dari faktor LDR.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta dari tujuh rasio yang digunakan yaitu: KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR.

Dengan demikian, hasil penelitian dengan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak terdapat perbedaan apabila ditinjau dari rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja finansial Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak terdapat perbedaan dapat diartikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terhadap BPR milik

pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja finansial ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Campur tangan pemerintah daerah terhadap BPR milik pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan yang dibuat tidak membuktikan bahwa kinerja finansial BPR milik pemerintah daerah lebih bagus daripada kinerja finansial BPR milik swasta. Campur tangan pemerintah daerah terhadap BPR milik pemerintah daerah hanya sebatas untuk mempertahankan kinerja finansial yang hasilnya tidak berbeda dengan kinerja finansial BPR milik swasta.

BPR milik swasta memiliki kinerja finansial yang tidak berbeda dengan BPR milik pemerintah daerah meskipun BPR milik swasta tidak mendapatkan bantuan atau suntikan dana pada saat kinerja finansial terganggu. BPR milik swasta ternyata mampu mempertahankan kinerja finansialnya hanya dengan mengandalkan kemampuan tim manajemen internal dalam mengelola dana baik dana pinjaman bagi debitur maupun dana simpanan yang diterima dari nasabah.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran nyata bahwa masyarakat yang ingin meminjam dana atau menyimpan dananya tidak harus di BPR milik pemerintah daerah. Masyarakat bisa juga meminjam dana atau mempercayakan dananya untuk disimpan di BPR milik swasta karena ternyata tidak terdapat perbedaan kinerja finansial antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta.

Dari tujuh rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kinerja finansial BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ternyata menghasilkan rasio dalam kategori yang tidak berbeda. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakan jasa BPR baik BPR milik pemerintah daerah maupun BPR milik swasta.

Hasil penelitian ini memberikan bukti pula bahwa kinerja finansial BPR baik BPR milik pemerintah daerah maupun BPR milik swasta tidak kalah dengan kinerja finansial bank umum meskipun dengan skala usaha yang lebih kecil daripada bank umum. Dengan demikian sangatlah tepat dikatakan bahwa BPR memiliki peranan penting dalam rangka ikut memajukan perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, tentunya dalam skala usaha yang dijalankan oleh BPR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio rata-rata KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang sehat meskipun angka rasionya berbeda.
2. Rasio rata-rata NPL (*Non Performing Loan*) antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang kurang sehat meskipun angka rasionya berbeda.
3. Rasio rata-rata PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan rasio rata-rata ROA (*Return On Asset*) antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang sehat meskipun angka rasionya berbeda.

4. Rasio rata-rata BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) dan rasio rata-rata CR (*Cash Ratio*) antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang sehat meskipun angka rasionya berbeda.
5. Rasio rata-rata LDR (*Loan to Deposit Ratio*) antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta tidak ada perbedaan dan kinerja finansial keduanya berada dalam kondisi yang belum sehat (tidak sehat dan kurang sehat) dengan angka rasionya berbeda sangat tipis.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Rasio rata-rata KPMM, PPAP, ROA, BOPO, dan CR antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta harus dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan sehingga kinerja finansial keduanya selalu berada dalam kondisi sehat, caranya yaitu dengan menerapkan manajemen pengelolaan dana secara efektif dan efisien serta kredit yang diberikan selalu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pencairan kredit.
2. Rasio rata-rata NPL antara Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta harus ditingkatkan dari kurang sehat menjadi sehat, caranya yaitu dengan melakukan penagihan secara aktif terhadap kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) yang terdapat pada Bank Perkreditan

Rakyat milik pemerintah daerah dan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta sehingga setiap kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan secara tepat waktu.

3. Rasio rata-rata LDR Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak sehat, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat milik swasta berada dalam kondisi kurang sehat. Oleh karena itu, rasio rata-rata LDR yang belum sehat tersebut harus ditingkatkan menjadi sehat, caranya yaitu dengan lebih hati-hati dalam memberikan atau mencairkan kredit bagi debitur sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah serta dengan lebih aktif dan kreatif dalam menghimpun dana segar dari masyarakat berupa tabungan dan deposito serta penambahan dana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dharnaeny Taufik. 2012. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Hasa Mitra Makassar dengan Metode CAMEL (Periode 2006-2010)*.
- Alam, Syamsu. 2012. *Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Nasional Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global*. Jurnal Ekonomi Balance. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andani, Mega Amelia. 2012. *Analisis Laporan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Anindya, Dian Kinasih. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Krisis Global (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2007 – 2009)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2006. *Analisis Informasi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Christian Widiharto. 2008. *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)*.
- Christine Cesilia. 2013. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global*. Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri Pratikto dan Iis Sugianto. 2011. *Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis*. Universitas Negeri Malang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lilis Prihatiningsih. 2006. *Penerapan Metode CAMEL Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Bali Budikusuma Mandiri Kudus)*.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marissa Ardiyana dan Dul Muid. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Sebelum, Selama dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 dengan Menggunakan Metode CAMEL*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Marpaung, Sinta Fitri. 2011. *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Marwanto Marsuki, dkk. 2012. *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta*. Jurnal Analisis Vol. 1 Juni 2012.
- Merry Yanuarsih Hidayat. 2013. *Penilaian Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global Pada Perusahaan Sektor Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Munawir S. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Mustika Istiani. 2009. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL Rating System (Studi Kasus Pada PT. BPR Sukowati Jaya Sragen)*.
- Perbarindo Riau. 2014. *Data Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Riau*.
- Riyadi, Azis. 2006. *Analisis Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2006. *Memahami Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Toto Warsoko Pikir. 2006. *Perbedaan Kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Fit And Proper Test*. Unika Widya Mandala Surabaya.
- Widiarto, Wahyu. 2006. *Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR. BKK) dengan BPR Swasta (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Tesis. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Wild, John J. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarni, F. dan G. Sugiyarso. 2006. *Konsep Dasar dan Siklus Akuntansi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yeni Kusumaningsih. 2010. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PD. BPR BKK Boja Kendal*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 *Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 *Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*.

**KINERJA FINANSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
DAN MILIK SWASTA DI PROVINSI RIAU**

- | | |
|---|---|
| Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 <i>Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.</i> | <i>Perkreditan Rakyat Tanggal 31 Desember 2009.</i> |
| Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 <i>Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.</i> | Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 <i>Tentang Lembaga Keuangan.</i> |
| Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU <i>Tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank</i> | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 <i>Tentang Perbankan.</i> |